

ABSTRAK

NURLATIFAH HANUM

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang khusus menangani sengketa di sektor jasa keuangan

Permasalahannya adalah bagaimana aturan hukum mengenai penyelesaian sengketa layanan jaminan kredit bank syariah yang dibenarkan dalam aturan perundang-undangan? bagaimana tanggung jawab hukum atas sengketa yang timbul dalam layanan kredit bank syariah? bagaimana pertimbangan hakim atas sengketa yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022?

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Aturan hukum mengenai penyelesaian sengketa layanan jaminan kredit bank syariah yang dibenarkan dalam aturan perundang-undangan dilakukan dengan cara. penanganan pembiayaan bermasalah apabila ditemukan penunggakan pembayaran angsuran oleh nasabah diakibatkan oleh macetnya sumber pendapatan yang bersifat permanen, misalnya karena pemecatan, perceraian, atau PHK. Maka upaya yang bisa diambil yaitu penjualan agunan oleh nasabah atau bank. Tanggung jawab hukum atas sengketa yang timbul dalam layanan kredit bank syariah. Tanggung jawab hukum merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan apabila debitur melakukan kesalahan. Pihak perbankan seringkali memberikan penyelesaian permasalahan dengan menggunakan jalur mediasi. Apabila dengan menggunakan jalur mediasi dirasa tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Pertimbangan hakim atas sengketa yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022. Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Lhokseumawe, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Para pihak harus membuktikan dalil-dalilnya jika ada wanprestasi sehingga bukan merupakan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memeriksa. Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hasballah tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm., tanggal 25 Mei 2022

Kata Kunci : Analisis Yuridiss, Sengketa, Konsumen.

ABSTRACT

NURLATIFAH HANUM

The Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector is an alternative dispute resolution institution that specifically handles disputes in the financial services sector

The problem is how are the legal rules regarding the resolution of disputes over sharia bank credit guarantee services that are justified in the statutory regulations? What is the legal responsibility for disputes arising in Islamic bank credit services? How do judges consider the dispute that occurred in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022?

This research is descriptive in nature with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize legal science with an emphasis on secondary data. To complete the data, this is done by collecting relevant materials and conducting literature studies, after which the data will be analyzed juridically.

It is concluded that the legal rules regarding the resolution of disputes over sharia bank credit guarantee services which are justified in the statutory regulations are carried out in a manner. handling problematic financing if customers are found to be in arrears in installment payments due to permanent disruption of their source of income, for example due to dismissal, divorce or layoff. So the effort that can be taken is selling collateral by the customer or bank. Legal responsibility for disputes arising in sharia bank credit services. Legal responsibility is an action that must be taken if the debtor makes a mistake. Banks often resolve problems using mediation. If it is felt that using mediation has not reached an agreement between both parties. The judge's consideration of the dispute that occurred in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022. That the objections to the cassation cannot be justified, because after carefully examining the cassation memorandum and counter cassation memorandum connected with the consideration of *Judex Facti* in this case the Lhokseumawe District Court, it turns out that *Judex Facti* did not apply the law incorrectly. The parties must prove their arguments if there is a default so it is not within the authority of the Consumer Dispute Resolution Agency to investigate. The cassation petition submitted by Cassation Petitioner Hasballah must be rejected with improvements to the decision of the Lhokseumawe District Court Number 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm., dated 25 May 2022

Keywords: Juridical Analysis, Disputes, Consumers.